

Kertas Kerja Yayasan Penabulu
di Sumatera Selatan

HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN
FOREST4DEV

**Mengungkit Efektivitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bagi Pembangunan Daerah
Melalui Inovasi Model Kemitraan
Dan Pengembangan Jaringan Diskusi Pembangunan Berkelanjutan**



LATAR BELAKANG

Efektifitas pengelolaan (pemanfaatan) sumberdaya pembangunan di daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya secara bersama-sama oleh parapihak terkait. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia dan penggunaan anggaran pembangunan di daerah yang terjadi setiap tahun masih menyimpan pertanyaan besar tentang pengaruh dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan mendasar yang masih dihadapi masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama dari proses pembangunan itu sendiri. Bagi sebagian wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, HUTAN merupakan sumberdaya yang tersedia secara melimpah¹. Namun setelah sumberdaya ini dimanfaatkan hingga habis belum juga melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat: akses minim, tingkat kemiskinan tinggi, pengangguran, tingkat pendidikan rendah, kebutuhan air tidak terpenuhi, pengelolaan sampah dan limbah, produktivitas pertanian rendah, konflik lahan dimana-mana masih menjadi persoalan yang masih sangat mudah dijumpai di lapangan.²

Kenyataan ini mengundang pertanyaan besar: Apa yang sesungguhnya terjadi dengan strategi pengelolaan sumberdaya (hutan) kita? Salah strateginya atau salah implementasinya? Beberapa pendekatan baru terkait dengan pengelolaan sumberdaya pembangunan daerah baik melalui dorongan teknokratis maupun penguatan partisipasi masyarakat tampaknya belum mampu meningkatkan efektifitas roda pembangunan termasuk cita-cita mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan (*Sustainable Forest Resource Management*)

¹ Sumatera Selatan mempunyai luas wilayah sekitar 91.592 km² dengan luas hutan sebanyak 3,5 juta ha. Paling tidak terdapat 563 desa di Sumatera Selatan yang berada di dalam dan di sekitar hutan dengan ribuan kepala rumah tangga hidup dalam keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan serta penghidupan yang layak.

² Dengan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki provinsi ini masih bergulat dengan angka kemiskinan yang tinggi. Persentase penduduk miskin masih pada angka 12,80 % sedangkan persentase rata-rata kemiskinan nasional hanya 9,82 persen

Sejak kebijakan tentang Perhutanan Sosial dan juga kebijakan tentang Kemitraan Konservasi pada kawasan-kawasan konservasi dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya dapat menjadi tonggak bagi parapihak untuk bahu membahu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah/wilayah yang mempunyai sumberdaya hutan luas melalui upaya tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*).³ Hingga saat ini berbagai peluang pengelolaan hutan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat (terutama di sekitar kawasan hutan) belum juga terselenggara secara optimal.⁴ Kebijakan Perhutanan Sosial dan juga Kemitraan Konservasi masih ditanggapi dingin oleh pemerintah daerah, apalagi oleh pemerintah kabupaten yang telah dicabut kewenangannya dalam urusan atau sektor kehutanan. Akses terhadap sumberdaya hutan yang secara legal telah diterima oleh masyarakat belum dianggap potensi besar dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di sekitar kawasan hutan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa akses legal terhadap sumberdaya lahan yang sedemikian besar ini belum mampu memberikan stimulus bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk bergerak lebih lanjut? Ternyata masih banyak persoalan disana. Ijin atau legalitas pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat ternyata masih menyimpan potensi konflik yang besar baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal terkait dengan konflik antara masyarakat penerima ijin dengan “pengelola/penguasa sebelumnya”, konflik horizontal adalah terkait dengan belum adanya pembagian “jatah kelola” yang *clear and clean* antar anggota kelompok tani penerima ijin perhutanan sosial. Berbagai konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan inilah yang menjadikan tata kelola hutan menjadi sulit menemukan rel progresifitasnya, bukan saja dalam konteks pengembangan Perhutanan Sosial namun juga pada aspek pengelolaan hutan yang lain termasuk penanggulangan kebakaran hutan, dan juga program-program rehabilitasi lahan.

Keinginan mulia pemerintah pusat untuk memberikan akses sumberdaya hutan kepada masyarakat demi kesejahteraan mereka ternyata masih menjumpai berbagai batu sandungan di tingkat lapangan. Tentu hal ini adalah tantangan bukan saja bagi pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks ini maka pembangunan/pengelolaan hutan seharusnya bukan lagi dipandang sebagai sekedar menanam kembali hutan yang gundul atau memanen tegakan hutan yang masih ada, pengelolaan hutan saat ini dan di masa depan adalah agenda menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan sosial.

Konteks mensejahterakan masyarakat (meskipun ada di kawasan hutan) bukan hanya domain kawan-kawan yang bergerak di sektor kehutanan atau para rimbawan saja. Sumberdaya dan

³ Kebijakan perhutanan sosial dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 2016. Berdasarkan kebijakan ini Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sementara Kemitraan Konservasi diselenggarakan atas dasar Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2018. Aturan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara kemitraan konservasi, utamanya memberikan landasan regulasi bagi pengelola Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) dalam mengembangkan kerjasama dengan masyarakat di sekitar kawasan.

⁴ Hingga awal tahun 2020 paling tidak tercatat lebih dari 130 ijin perhutanan sosial di Sumatera Selatan yang meliputi lebih dari 100.000 ha kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dengan berbagai skema. Program ini melibatkan sekitar 16.000 KK yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan.

energi para rimbawan sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan tantangan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang baik. Dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang nyata di lapangan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten hingga pemerintah desa untuk mengukir prestasi tata kelola hutan yang lestari dan mensejahterakan. Potensi parapihak atau mitra pembangunan juga perlu dioptimalkan melalui ruang-ruang sinergi dan koordinasi, sehingga inisiatif para mitra pembangunan baik dari swasta maupun dari NGO mampu mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumberdaya hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hutan Untuk Kesejahteraan (FOREST4DEV) adalah visi Yayasan Penabulu untuk menjalin sinergi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tata kelola hutan demi meraih cita-cita pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola hutan yang baik, lestari dan berkeadilan sosial maka akan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meraih target-target *Sustainable Development Goal's* (SDG's). Yayasan Penabulu berharap visi Hutan Untuk Kesejahteraan (FOREST4DEV) ini juga menjadi visi pemerintah daerah dimana Yayasan Penabulu menjalankan aktivitasnya.

Untuk visi diatas Yayasan Penabulu telah merintis pengembangan beberapa inovasi Model Tapak Kemitraan Hutan Untuk Kesejahteraan di tingkat tapak di wilayah Kabupaten MUBA, Kabupaten Banyuasin dan juga Kabupaten Lahat. Model Tapak Hutan Untuk Kesejahteraan yang ang telah dirintis oleh Yayasan Penabulu adalah sebagai berikut:

Tapak

<p><i>Pengelolaan Kawasan Upland Berkelanjutan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pola Pemanfaatan Lahan dan hutan yang belum optimal baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan • Lahan kritis dan perambahan hutan • Pengelolaan potensi komoditi dan jasa lingkungan yang belum optimal • Kesadaran masyarakat tentang kelestarian keanekaragaman hayati • Kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan 	<p>Kabupaten Lahat, Kecamatan Kota Agung dan Mulak Ulu</p>	<p>Pemdes, Kelompok Tani, Dinas Kehutanan, KPH Semendo, Dinas Pertanian,</p>
<p><i>Sinergi untuk Pemetaan Batas Desa Hutan Partisipatif</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik batas wilayah desa • Minimnya perhatian dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ini 	<p>Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batanghari Leko, MUBA</p>	<p>Pemerintah desa Pangkalan Bulian, 8 Desa yang berbatasan, kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Bappeda, Setda bagian Tapem, KPH Meranti</p>
<p><i>Pengembangan Perhutanan Sosial Kolaboratif</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kemampuan petani penerima ijin perhutsos dalam menjalankan rencana usaha • Minimnya koordinasi dari pihak KPH dengan dinas-dinas terkait di kabupaten/provinsi untuk menindaklanjuti ijin perhutsos yang telah diterbitkan KLHK • Masih banyaknya konflik tenurial dalam kawasan iji perhutanan sosial 	<p>Desa Lubuk Bintialo, Gapoktan Meranti Wana Makmur Desa Muara Medak. Kecamatan Bayunglencir, MUBA</p>	<p>Gapoktan, Pemerintah Desa, KPH Meranti, KPH Lalan Mendis, Dinas Pertanian, Peternakan, PMD</p>
<p><i>Pencegahan Karhutbunla Kolaboratif berbasis desa</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya perhatian pada aspek “pencegahan” dalam mengatasi karhutbunla • Rendahnya sinergi dan koordinasi parapihak yang terkait dengan Karhutbunla • Potensi desa dalam pencegahan karhutbunla belum dioptimalkan • Ketidakefektifan upaya pemadaman pada kejadian karhutbunla yang terlanjur besar 	<p>Desa Muara Medak. Kecamatan Bayunglencir, MUBA</p>	<p>Repair, Pemdes, Kecamatan, KPH Lalan Mendis, Dinas Kehutanan, Litbang Kehutanan, Manggala Agni, Perusahaan di sekitar Desa Muara Medak</p>
<p><i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kepedulian Masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai penting kawasan konservasi • Belum tersedianya sistem pembuangan sampah rumah tangga yang memadai di kawasan perkampungan pesisir yang padat • Keterbatasan pemenuhan air bersih • Anak putus sekolah, kenakalan remaja dan Narkoba • Pengelolaan Potensi Wisata Belum Optimal • Gangguan hama tikus pada budidaya tanaman padi • Produktivitas pertanian rendah 	<p>Kecamatan Banyuasin II Kecamatan Karang Agung Ilir</p>	<p>Kecamatan, Bank Sampah, Pemdes, Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Budaya Bappeda, Dinas Pertanian, Kelompok Tani, Pemerintah Desa</p>

TUJUAN

Pengembangan inisiatif ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan contoh *best practice* terhadap penanganan berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka
2. Membangun “Laboratorium Kemitraan Hutan Untuk Kesejahteraan” di tingkat tapak yang mempunyai visi jangka panjang.
3. Membangun perspektif perubahan, kebaruan, dan kemanfaatan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya pengelolaan sumberdaya hutan

OUTPUT

- Terbangunnya model-model kemitraan-tematik yang efektif pada tapak-tapak yang telah ditetapkan sebagai wujud kontribusi inovasi Yayasan Penabulu bagi Sumatera Selatan
- Tersusunnya dokumentasi dalam frame *Story of Change* untuk setiap inisiatif yang dikembangkan.

MANFAAT

- Terbangunnya “tapak pembelajaran” bagi parapihak terutama dari pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengatasi berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan di Sumatera Selatan.
- Terbangunnya nalar kritis dan kreatif masyarakat tentang pengelolaan sumberdaya hutan yang efektif dan berkelanjutan

STRATEGY PELAKSANAAN

Secara prinsip untuk mengungkit efektivitas pembangunan daerah di Sumatera Selatan ini akan menggunakan pendekatan ***Continuous Evidence-Based Learning And Improvement Process*** yang akan ditempuh melalui langkah-langkah

- Memperkuat dan mempertajam konseptualisasi pada setiap inisiatif Kemitraan-Tematik yang telah dirintis, termasuk penetapan indikator keberhasilan inisiatif tersebut secara partisipatif
- Memperkuat komunikasi, dialog dan sinergi dengan parapihak terkait baik dari pemerintah, swasta, maupun NGO, melalui Jaringan Diskusi HUTAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
- Mengembangkan media komunikasi dan kampanye HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN (FOREST4DEV)

TAHAPAN PENGEMBANGAN

FASE I : PENYEMPURNAAN MODEL TAPAK

Untuk melihat kebutuhan di setiap area model perlu dilakukan analisis terhadap capaian yang hingga saat ini telah dihasilkan. Berikut ini adalah analisis dan evaluasi terhadap Kemitraan di tingkat tapak yang telah dirintis.

1. Judul Model Tapak : Pengelolaan Kawasan *Upland* Berkelanjutan



Hasil Yang Diharapkan	Capaian Saat Ini	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none">• Adanya desa model untuk agroforestry optimal di kawasan upland Sumatera Selatan• Adanya desa model pemanfaatan jasa lingkungan	Baru tahapan assessment dan profiling kawasan dan desa-desa		

2. Judul Model Tapak: Sinergi Untuk Pemetaan Batas Desa Hutan Partisipatif



Hasil Yang Diharapkan	Capaian Saat Ini	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
<p>Adanya contoh-contoh sukses pemetaan wilayah desa partisipatif yg mendukung pengelolaan hutan lestari ke depan</p>	<p>Batas-batas telah disepakati oleh parapihak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memerlukan dukungan Pemerintah Kabupaten yang lebih kuat - Peralihan tupoksi dari tapem ke BPMD membutuhkan banyak penyesuaian lagi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawal proses formal di kabupaten • Pemasangan patok di lapangan • Pelaporan hasil ke Pemerintah Daerah (Bupati)

3. Judul Model Tapak: Pengembangan Perhutanan Sosial Kolaboratif



Hasil Yang Diharapkan	Capaian Saat Ini	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya Kelembagaan Gapoktan • Menguatnya dukungan sektor-sektor terkait • Terkelolanya lahan hutan secara produktif dan lestari oleh masyarakat • Meningkatnya pendapatan keluarga petani hutan • Menurunnya jumlah RT miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan Petani • Rintisan demplot agroforestry dan dan Budidaya lebah klulut • Komunikasi dengan dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok tani penerima ijin perhutanan sosial masih belum memahami ketentuan tentang perhutanan sosial • Pemerintah Kabupaten perlu dilibatkan lebih jauh untuk mendukung kelompok tani 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan kelembagaan • Input saprotan untuk demplot • Pemeliharaan tanaman • Peralatan produksi olahan sederhana • Pelaporan dan koordinasi perkembangan ke Pemda

4. Judul Model Tapak: Pencegahan Karhutbunla Kolaboratif berbasis desa



Hasil Yang Diharapkan	Capaian Saat Ini	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya kelembagaan di tingkat desa untuk pencegahan karhutlah • Tersusunnya rencana pencegahan karhutlah tingkat desa • Menguatnya dukungan parapihak ke desa dalam pencegahan karhutbunlah • Pencegahan karhutlah dapat berjalan secara intensif • Menurunnya kejadian karhutbunlah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya kelembagaan Peduli Kebakaran tingkat desa • Telah tersusun rumusan rencana aksi mitigasi yang disusun bersama parapihak tingkat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu segera dilakukan komunikasi dan promosi terhadap konsep yang telah dirumuskan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penajaman rencana aksi • Pengutanan Koordinasi, sinergi dan kontribusi parapihak (pemda dan perusahaan) • Pelaporan perkembangan ke Pemda

5. Judul Model Tapak: Peningkatan Kesejahteraan dan Kepedulian Masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi



Hasil Yang Diharapkan	Capaian Saat Ini	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan lingkungan yang baik di perkampungan sungsgang (Kecamatan Banyuasin II) • Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat • Inovasi ekonomi yang ramah lingkungan • Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat/generasi muda tentang nilai penting konservasi sumberdaya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ada rintisan sistem pengelolaan sampah yg melibatkan desa dan kecamatan • Percontohan Panen Air Hujan • Berkembangnya Rumah Budaya sebagai wadah aktualisasi generasi muda • Berkembangnya praktek pertanian ramah lingkungan (rubuha dan saprotan organic) di Kecamatan Karag Agung Ilir 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah terhenti karena covid • Percontohan PAH perlu dicek pemanfaatannya, pembinaan tenaga teknis belum berhasil • Kegiatan Rumah Budaya masih bersifat insidental 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi dan pengembangan sistem pengelolaan sampah • Pengembangan Model PAH Komunal • Penyusunan agenda jangka panjang Rumah Budaya • Kampanye Lingkungan dan Konservasi • Pengembangan ekonomi ramah lingkungan

Laboratorium Kemitraan Hutan Untuk Kesejahteraan
FOREST4DEV



**PENGELOLAAN
KAWASAN *UPLAND*
BERKELANJUTAN**
Kecamatan Kota
Agung dan Mulak Ulu,
Kabupaten Lahat



**SINERGI UNTUK
PEMETAAN BATAS
DESA HUTAN
PARTISIPATIF**
Desa Pangkalan
Bulian, Bayung Lencir,
Muba



**PERHUTANAN SOSIAL
KOLABORATIF**
Desa Lubuk Bintialo,
Batanghari Leko, Muba
Desa Muara Medak
Kecamatan Bayung Lencir,
Muba



**PENCEGAHAN
KARHUTBUNLAH
KOLABORATIF BERBASIS
DESA**
Desa Muara Medak,
Bayung Lencir, Muba



**PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN
KEPEDULIAN MASYARAKAT
DI DAERAH PENYANGGA
KAWASAN KONSERVASI**
Kecamatan Banyuasin II,
Banyuasin, Kecamatan
Karang Agung Ilir

**PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI INOVASI MODEL KEMITRAAN-TEMATIK DI TINGKAT TAPAK**

Continuous Evidence-Based Learning And Improvement Process